# BUPATI SIDOARJO
# PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a bahwa dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan di desa yang efektif, efisien dan akuntabel, perlu penyempurnaan materi Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 27), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 27), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diperuntukkan bagi Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten;
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
19. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
20. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya.
21. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
22. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran

28. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
29. Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga .desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
30. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
31. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
32. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
33. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
34. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat SISKUEDES adalah Sitem Pengelolaan Keuangan Desa berbasis aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
35. Sistem Informasi Desa, yang selanjutnya disingkat SID adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya di tingkat desa.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh Staf pada Urusan Keuangan.

(2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
    a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
    b. Transfer; dan
    c. Pendapatan Lain-Lain.
(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
    a. Hasil usaha dari BUMDes;
    b. Hasil pengelolaan aset desa;
    c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
    d. Lain-lain pendapatan asli desa.
(4) Hasil usaha dari BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah penerimaan yang berasal dari hasil usaha.
(5) Hasil pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah penerimaan yang berasal dari pemanfaatan aset desa, antara lain sewa, dan kerjasama.
(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
(7) Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

5. Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) dihapus, Ayat (3) dan (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
(2) *dihapus*
(3) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
(4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
(5) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
(6) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKPDesa.

6. Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) dihapus dan Ayat (3) dan (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
(2) *Dihapus*
(3) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
(4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
(5) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
(6) Kepala Desa menetapakan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa, paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

7. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam lembaran berita desa diumumkan dalam Media informasi pada papan pengumuman dan Sistem Informasi Desa (SID).

8. Ketentuan Pasal 30 Ayat (4) diubah dan diantara Ayat (4) dan Ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu Ayat (4A), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
(2) Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening atas nama pemerintah desa pada bank umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa.
(3) Penunjukan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD.
(4) Setiap pengeluaran pada rekening kas desa harus dilampiri dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh masing-masing pelaksana kegiatan desa dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.
(4A) Kepala Desa dan Bendahara desa menandatangani Cek Giro disertai SPP sebagaimana dimaksud ayat (4) untuk dicairkan pada Bank Persepsi di Kecamatan masing-masing.
(5) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah program dan kegiatan yang dibiayai oleh pihak lain dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
(6) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah program dan kegiatan yang dibiayai oleh pihak lain dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
(7) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

9. Ketentuan Pasal 35 ditambah 1 (satu) Ayat, yaitu Ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

(1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pelaksana Kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
(2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikecualikan untuk pelaksanaan kegiatan swakelola.

10. Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 49A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49A

Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDes).

11. Pasal 50 sampai dengan 60 dihapus.

Pasal 50
*dihapus*

Pasal 51
*dihapus*

Pasal 52
*dihapus*

Pasal 53
*dihapus*
Pasal 54
*dihapus*

Pasal 55
dihapus

Pasal 56
*dihapus*

Pasal 57
*dihapus*

Pasal 58
*dihapus*

Pasal 59
*dihapus*

Pasal 60
*dihapus*

12. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

(1) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
(2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
(3) Penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

13. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa kepada Bupati setiap semester.

(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
   a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
   b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(3) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.
(4)

14. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

(1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh :
   a. Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
   b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo;;
   c. Camat.
(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b meliputi :

a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
b. memberikan bimbingan dan pelatihan dan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;
c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan adminisitrasi keuangan desa.

(3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
c. memfasilitasi pelaksanaan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa;
d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban APBDesa;
e. Binwas dimaksud khususnya untuk penatausaahaan keuangan agar melakukan kepada desa setiap tribulan dan melaporkan kepada bupati tembusan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana

15. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 27), sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 7), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam terlampir dan merupakan bagaian yang tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Juli 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal, 18 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 50

NOREG PERBUP : 50 TAHUN 2017

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

RANCANGAN PERATURAN DESA .....
NOMOR .... TAHUN .....
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ... Tahun ..... tentang ....., Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor ..... );
6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ..... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| 1. Pendapatan Desa | Rp…..... |
| 2. Belanja Desa : | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp…..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp…..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp…..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp…..... |
| e. Bidang Tak Terduga | Rp…..... |
| Jumlah Belanja | Rp…..... |
| Surplus/Defisit | Rp…..... |
| | = = = = = = = = = ==== |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. ……..... |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. ..... |
| Selisih Pembiayaan ( a – b ) | Rp……..... |
| | = = = = = = = = = ==== |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....

KEPALA DESA .....

.....

H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

RANCANGAN PERATURAN DESA .....
NOMOR ..... TAHUN.....
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ... Tahun ..... tentang ....., Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor ..... );
6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....
MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ..... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... TAHUN ANGGARAN ..... MENJADI PERATURAN DESA ..... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ..... TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp……
2. Belanja Desa
   a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp…….
   b. Bidang Pembangunan Rp…….
   c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp…….
   d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp…….
   e. Bidang Tak Terduga Rp…….
   Jumlah Belanja Rp…….
   Surplus/Defisit Rp…….
   = = = = = = = = = ===

3. Pembiayaan Desa
   a. Penerimaan Pembiayaan Rp. …….
   b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. …….
   Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp…….
   = = = = = = = = = =====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran .....;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun .....
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di .....
Pada tanggal .....
KEPALA DESA .....

.....

**F. FORMAT PENATAUSAHAAN**

**9. BUKU REGITER PENUTUPAN KAS**

**REGISTER PENUTUPAN KAS**
**DESA.....KECAMATAN.....**

---

Tanggal Penutupan Kas : .....
Nama Penutup Kas : .....(Nama Bendahara Desa)
Tanggal Penutupan Kas yang lalu : -
- Jumlah Penerimaan s.d tanggal ..... : Rp. .....
- Jumlah Pengeluaran s.d tanggal ..... : Rp.....
  Saldo Buku Rp. .....
  Saldo Kas Rp. .....

Terdiri dari :

1. Uang Kertas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pecahan Rp 100.000,00 | = | ..... | Lembar | Rp. ..... |
| Pecahan Rp 50.000,00 | = | ..... | Lembar | Rp. ..... |
| Pecahan Rp 20.000,00 | = | ..... | Lembar | Rp. ..... |
| Pecahan Rp 10.000,00 | = | ..... | Lembar | Rp. ..... |
| Pecahan Rp 5.000,00 | = | ..... | Lembar | Rp. ..... |
| Pecahan Rp 1.000,00 | = | ..... | Lembar | Rp. ..... |

2. Uang Logam

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pecahan Rp | 500,00 | = ..... | Keping | Rp. ..... |
| Pecahan Rp | 200,00 | = ..... | Keping | Rp. ..... |
| Pecahan Rp | 100,00 | = .... | Keping | Rp. ..... |
| | | | Jumlah | Rp. ..... |
| | | | Perbedaan | Rp. ..... |

3. Penjelasan Perbedaan :Uang sebesar Rp. .....
4. pada rekening bank ( Saldo Bank ) a.n Pemerintah Desa .....

Sidoarjo, .....

Mengetahui,
Kepala Desa .....

Bendahara Desa

_____

_____

**F. FORMAT PENATAUSAHAAN**

**10. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS**

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS**
**DESA.....KECAMATAN.....**

Pada hari ini, …… tanggal …....., yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Lengkap : ……
Jabatan : Kepala Desa ……Kecamatan ……Kabupaten Sidoarjo
Sesuai dengan Keputusan …… Nomor : …… tanggal …….
Sebagai Kepala Desa ……, melakukan Pemeriksaan setempat pada :
Nama Lengkap : …….
Jabatan : Bendahara Desa
Berdasarkan Keputusan ……. Nomor : …… Tanggal ……. ditugaskan mengurus uang, berdasarkan hasil Pemeriksaan Kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan ini, kami menemui kenyataan sebagai berikut :
a. Uang Kertas ..... Rp. ……
b. Uang Logam ..... Rp. ……
Jumlah ..... Rp.……
Saldo uang menurut Buku Kas Pembantu ..... Rp. ……
Perbedaan antara Saldo Kas dan Saldo Buku Rp. ……

Penjelasan Perbedaan : ……..……

Sidoarjo, …….

| | |
|---|---|
| Yang Diperiksa, | Yang Memeriksa |
| Bendahara Desa | Kepala Desa …… |
| ..... | ..... |

**F. FORMAT PENATAUSAHAAN**

**11. SURAT PENGANTAR**

Sidoarjo, .....

Kepada,

Nomor : 900/ /404…../20.... Yth. Sdr. Kepala Desa.....

Sifat : Penting .....

Lampiran : di

Perihal : Laporan Pertanggungjawaban S I D O A R J O

Bendahara Desa Bulan .....

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Desa, Bulan ....., dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo bulan lalu Rp.
2. Penerimaan bulan ini Rp. _____

Jumlah Rp.

3. Pengeluaran bulan ini Rp. _____
4. Saldo s/d bulan ini Rp.

(.....).

Demikian untuk menjadi periksa.

**Bendahara Desa**

.....

## I. PARAMETER

### 1. BIDANG DAN KEGIATAN

| KODE | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **01** | **Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa** | |
| 01.01. | Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | |
| 01.02. | Kegiatan Operasional Perkantoran | |
| 01.03. | Kegiatan Operasional BPD | |
| 01.04. | Kegiatan Operasional RT/RW | |
| 01.05. | Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor | |
| 01.06. | Kegiatan Intenifikasi Pajak Daerah/Pajak Bumi Bangunan | |
| 01.07. | Kegiatan Peningkatan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 01.08 | Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan | |
| 01.09. | Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa | |
| 01.10. | Kegiatan Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa | |
| 01.11. | Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Desa | |
| 01.12. | Penetapan Desa dalam Keadaan Darurat | |
| 01.13. | Penetapan BUM desa | |
| 01.14. | Kegiatan Pendataan dan Pengklasiikasian Tenaga Kerja | |
| 01.15. | Kegiatan Pendataan Penduduk Yang Bekerja pada Sektor Pertanian dan Sektor | |
| 01.16. | Kegiatan Pendataan Penduduk Menurut Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan | |
| 01.17. | Kegiatan Pendataan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan | |
| 01.18. | Kegiatan Pendataan Jenis Pekerjaan dan Status Pekerjaan | |
| 01.19. | Kegiatan Pendataan Penduduk Yang Bekerja di Luar Negeri | |
| 01.20. | Kegiatan Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa | |
| 01.21. | Kegiatan Pendataan Potensi Desa | |
| 01.22. | Kegiatan Pengelolaan Arsip Desa | |
| 01.23. | Pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa | |
| 01.24. | Fasilitasi Bidang Keagrariaan / Sertifikasi Aset-aset Desa/PBB Aset Desa/ Biaya Pendukung Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) | |
| 01.25. | Kegiatan Pengadaan, Inventarisasi Aset Desa dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa | |

| KODE | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 01.26. | Kegiatan Tilik Dusun dan Musyawarah Dusun | |
| 01.27. | Kegiatan Musyawarah Desa | |
| 01.28. | Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan | |
| 01.29. | Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum Desa | |
| 01.30. | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | |
| 01.31. | Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Desa | |
| 01.32. | Kegiatan Penyusunan Buku Profil Desa | |
| 01.33. | Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPJMDes | |
| 01.34. | Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RKPDes | |
| 01.35. | Kegiatan Penyusunan dan Penetapan APBDes | |
| 01.36. | Kegiatan Penyusunan Perubahan Perencanaan Desa | |
| 01.37. | Penyusunan Pelaporan LPPD, LKPJ Akhir Anggaran dan Akhir Masa Jabatan | |
| 01.38. | Kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa | |
| 01.39. | Kegiatan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kerja | |
| 01.40. | Kegiatan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa | |
| 01.41. | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) | |
| 01.42. | Kegiatan Penetapan Kerja Sama Antar Desa | |
| 01.43. | Kegiatan Pembentukan Badan Pemusyawaratan Desa | |
| 01.44. | Kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat | |
| **02** | **Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa** | |
| 02.01. | Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa | |
| 02.02. | Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah | |
| 02.03. | Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa | |
| 02.04. | Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Desa | |
| 02.05. | Pembangunan dan atau Perbaikan Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin | |
| 02.06. | Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah | |
| 02.07. | Pengadaan Kendaraan Pengangkut / Gerobak Sampah | |
| 02.08. | Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin Pengolah Sampah | |
| 02.09. | Pembangunan dan Perbaikan Selokan / Drainase | |

| KODE | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 02.10. | Pembangunan dan Pemeliharaan Tambatan Perahu | |
| 02.11. | Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman / Jalan Desa | |
| 02.12. | Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian / JUT | |
| 02.13. | Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa antar pemukiman ke wilayah Lokasi Wisata | |
| 02.14. | Pembangunan dan Perbaikan Jembatan Desa | |
| 02.15. | Pembangunan dan Perbaikan Gorong-gorong | |
| 02.16. | Pembangunan dan Pemeliharaan Terminal Desa | |
| 02.17. | Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro | |
| 02.18. | Jaringan distribusi tenaga listrik | |
| 02.20. | Pembangunan dan Pemeliharaan Instalasi Biogas | |
| 02.21. | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Informasi dan Komunikasi Desa | |
| 02.23. | Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa | |
| 02.24. | Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan | |
| 02.25. | Pembangunan dan Pemeliharaan MCK dan Jambanisasi | |
| 02.26. | Pengadaan dan Pemeliharaan Ambulance/ mobil Desa | |
| 02.27. | Pembangunan dan Pemeliharaan Balai Pengobatan Desa | |
| 02.28. | Pembangunan dan Pemeliharaan Posyandu | |
| 02.29. | Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat | |
| 02.30. | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) / Taman Belajar Keagamaan (TPQ) | |
| 02.31. | Balai Pelatihan/kegiatan belajar masyarakat | |
| 02.32. | Pembangunan Perpustakaan Desa | |
| 02.33. | Pengadaan Buku/Bahan Bacaan | |
| 02.34. | Pengembangan Sanggar Seni | |
| 02.35. | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan lainnya | |
| 02.36. | Pembangunan dan Pemeliharaan Dam / Bendungan Berskala Kecil | |
| 02.37. | Pembangunan atau Perbaikan Embung Desa | |
| 02.38. | Pembangunan atau Perbaikan Sistem Pengairan / Irigasi Desa | |
| 02.39. | Percetakan Lahan Pertanian | |

| KODE | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 02.40. | Pembuatan dan Pemeliharaan Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan | |
| 02.41. | Pengadaan dan Pemeliharaan Kapal / Perahu Penangkap Ikan | |
| 02.42. | Pengadaan dan Pemeliharaan Cold Storage (gudang pendingin | |
| 02.43. | Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) | |
| 02.44. | Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Tambak Gara | |
| 02.45. | Pembangunan dan Pemeliharaan Kandang Ternak | |
| 02.46. | Pengadaan dan Pemeliharaan Mesin Pakan Ternak | |
| 02.47. | Pembangunan dan Pemeliharaan Lumbung Desa | |
| 02.48. | Pengadaan atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi lainnya | |
| 02.49. | Pembangunan/Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Desa | |
| 02.50. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Desa Wisata | |
| 02.51. | Pengadaan Fasilitas Sarana dan Prasaana Desa Wisata | |
| 02.52. | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Pasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) | |
| 02.53. | Kegiatan Pelestarian Lingkungan Hidup | |
| 02.54. | Kegiatan Penghijauan | |
| 02.55. | Pembuatan Terasering | |
| 02.56. | Kegiatan Pemeliharaan hutan bakau | |
| 02.57 | Kegiatan Perlindungan Mata Air | |
| 02.58. | Kegiatan Perlindungan Terumbu Karang | |
| 02.59. | Pembuatan dan Pemeliharaan Plengsengan Sungai | |
| 02.60. | Pembangunan Jalan Evakuasi Bencana | |
| 02.61. | Pembangunan Gedung Pengungsian | |
| 02.62. | Pembersihan Lingkungan Perubahan yang terkena Bencana Ala | |
| 02.63. | Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lingkungan Perumahan yang terkena Bencana Alam | |
| 02.64. | Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Lainnya | |
| **03** | **Bidang Pembinaan Kemasyarakatan** | |
| 03.01. | Kegiatan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | |
| 03.02. | Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban | |

| KODE | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 03.03. | Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama | |
| 03.04. | Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga | |
| 03.05. | Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat Desa | |
| 03.06. | Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat | |
| 03.07. | Kegiatan Senam Bersama | |
| 03.08. | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat Desa | |
| 03.09. | Kegiatan Pelaksanaan Lomba Desa | |
| 03.10. | Kegiatan Pelaksanaan Desa Siaga | |
| 03.11. | Kegiatan Pendampingan Hukum | |
| **04** | **Bidang Pemberdayaan Masyarakat** | |
| 04.01. | Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Fasilitasi KB | |
| 04.02. | Kegiatan Penyediaan Makanan Sehat untuk Gizi Balita dan Anak Sekolah | |
| 04.03. | Kegiatan Perawatan Kesehatan Ibu Hamil dan Menyusui | |
| 04.04. | Pelayanan Kesehatan desa seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia. | |
| 04.05. | Kegiatan Pelayanan Pendidikan PAUD/TPQ | |
| 04.06. | Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kerja, Kursus, dan Pelatihan Masyarakat | |
| 04.07. | Kegiatan Pengelolaan Sampah Berskala Rumah Tangga dan Air Limbah | |
| 04.08. | Kegiatan Pengelolaan terminal Desa dan atau Tambatan Perahu | |
| 04.09. | Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan | |
| 04.10. | Kegiatan Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian | |
| 04.11. | Kegiatan Pengelolaan Hasil Produksi Usaha Pertanian | |
| 04.12. | Kegiatan Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil | |
| 04.13. | Kegiatan Pendirian BUMDesa dan atau BUMDesa Bersama | |
| 04.14. | Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan atau Koperasi | |
| 04.15. | Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | |
| 04.16. | Kegiatan Pemasaran Hasil Produksi Usaha Ekonomi Masyarakat | |
| 04.17. | Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat dan Tenaga Sukarelawan dalam menghadapi dan penanganan bencana alam | |
| 04.18. | Kegiatan Pembersihan Daerah Aliran Sungai | |
| 04.19. | Kegiatan Pengelolaan hutan bakau | |

| KODE | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 04.20. | Kegiatan Pemeliharaan dan Perlindungan Terumbu Karang | |
| 04.21. | Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Keuangan dan Aset Desa berbasis digital | |
| 04.22. | Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa | |
| 04.23. | Kegiatan Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan | |
| 04.24. | Kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna | |
| 04.25. | Kegiatan Pengembangan Lembaga Kemasayarakatan Desa dan atau Lembaga Adat | |
| 04.26. | Kegiatan Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan atau Lembaga Adat | |
| 04.27. | Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD | |
| 04.28. | Kegiatan Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / LPMD | |
| 04.29. | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / LPMD | |
| 04.30. | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif | |
| 04.31. | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan / PKK | |
| 04.32. | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani | |
| 04.33. | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin | |
| 04.34. | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Nelayan | |
| 04.35. | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pengrajin | |
| 04.36. | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak | |
| 04.37. | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda / Karang Taruna | |
| **05** | **Bidang Tidak Terduga** | |
| 05.01. | Kegiatan Kejadian Luar Biasa / Penanggulangan Bencana Alam | |
| 05.02. | Kegiatan Kejadian Luar Biasa Lainnya / Penanggulangan Bencana Lainnya | |

## 2. REKENING APBDESA

| KODE | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ASET | |
| 1.1. | Aset Lancar | |
| 1.1.1. | Kas dan Bank | |

| KODE | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1.1.01. | Kas di Bendahara Desa | |
| 1.1.1.02. | Rekening Kas Desa | |
| 1.1.2. | Piutang | |
| 1.1.2.01. | Piutang Sewa Tanah | |
| 1.1.2.02. | Piutang Sewa Gedung | |
| 1.1.2.03. | Piutang Sewa Peralatan | |
| 1.1.2.04. | Piutang Bagi Hasil Pajak | |
| 1.1.2.05. | Piutang Bagi Hasil Retribusi | |
| 1.1.2.06. | Piutang Alokasi Dana Desa | |
| 1.1.2.07. | Piutang Panjar Kegiatan | |
| 1.1.2.08. | Piutang Lain-lain | |
| 1.1.3. | Persediaan | |
| 1.1.3.01. | Persediaan Benda Pos dan Materai | |
| 1.1.3.02. | Persediaan Alat Tulis Kantor | |
| 1.1.3.03. | Persediaan Blangko dan Barang Cetakan | |
| 1.1.3.04. | Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Batterai | |
| 1.1.3.05. | Persediaan Bahan/Material | |
| 1.1.3.06. | Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih | |
| 1.1.3.07. | Persediaan Bibit Hewan/Tanaman | |
| 1.1.3.08. | Persediaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyarakat | |
| 1.2. | Investasi | |
| 1.2.1. | Penyertaan Modal Pemerintah Desa | |
| 1.2.1.01. | Penyertaan Modal Pemerintah Desa | |
| 1.3. | Aset Tetap | |
| 1.3.1. | Tanah | |
| 1.3.1.01. | Tanah Bangunan Kantor | |
| 1.3.1.02. | Tanah Rumah Dinas | |
| 1.3.1.03. | Tanah Pertanian dan Perkebunan | |
| 1.3.1.04. | Tanah Sarana Kesehatan | |
| 1.3.1.05. | Tanah Sarana Pendidikan | |
| 1.3.1.07. | Tanah Sarana Umum | |
| 1.3.1.07. | Tanah Sarana Jalan | |
| 1.3.1.08. | Tanah Lainnya | |

| KODE | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.3.2. | Peralatan dan Mesin | |
| 1.3.2.01. | Alat-alat Berat | |
| 1.3.2.02. | Alat-alat Angkutan | |
| 1.3.2.03. | Alat-alat Bengkel | |
| 1.3.2.04. | Alat-alat Ukur | |
| 1.3.2.05. | Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan | |
| 1.3.2.06. | Peralatan Kantor | |
| 1.3.2.07. | Alat-alat Rumah Tangga | |
| 1.3.2.08. | Peralatan Komputer | |
| 1.3.2.09. | Alat-alat Studio/Audio | |
| 1.3.2.10. | Alat-alat Komunikasi | |
| 1.3.2.11. | Peralatan dan Mesin Lainnya | |
| 1.3.3. | Gedung dan Bangunan | |
| 1.3.3.01. | Gedung Kantor/Tempat Kerja | |
| 1.3.3.02. | Gedung Rumah Dinas/Jabatan | |
| 1.3.3.03. | Bangunan Gudang | |
| 1.3.3.04. | Bangunan Bersejarah | |
| 1.3.3.05. | Bangunan Monumen | |
| 1.3.3.06. | Tugu Peringatan | |
| 1.3.3.07. | Bangunan Lainnya | |
| 1.3.4. | Jalan, Jaringan dan Instalasi | |
| 1.3.4.01. | Jalan Desa | |
| 1.3.4.02. | Jembatan Desa | |
| 1.3.4.03. | Jaringan Air | |
| 1.3.4.04. | Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan | |
| 1.3.4.05. | Instalasi Listrik dan Telepon | |
| 1.3.4.06. | Instalasi Pengolah Sampah | |
| 1.3.5. | Aset Tetap Lainnya | |
| 1.3.5.01. | Buku dan Kepustakaan | |
| 1.3.5.02. | Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan | |
| 1.3.5.03. | Hewan dan Ternak | |
| 1.3.5.04. | Tanaman | |

| KODE | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1.3.6. | Konstruksi Dalam Pengerjaan | |
| 1.3.6.01. | Konstruksi Dalam Pengerjaan | |
| 1.3.9. | Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap | |
| 1.3.9.01. | Akumulasi Penyusutan Mesin dan Peralatan | |
| 1.3.9.02. | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan | |
| 1.3.9.03. | Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Instalasi | |
| 1.3.9.04. | Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Lainnya | |
| 1.4. | Dana Cadangan | |
| 1.4.1. | Dana Cadangan | |
| 1.4.1.01. | Dana Cadangan | |
| 1.5. | Aset Tidak Lancar Lainnya | |
| 1.5.1. | Tagihan Piutang Penjualan Angsuran | |
| 1.5.1.01. | Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaran Bermotor | |
| 1.5.1.02. | Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah | |
| 1.5.1.03. | Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir | |
| 1.5.2. | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | |
| 1.5.2.01. | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | |
| 1.5.3. | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | |
| 1.5.3.01. | Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer - BOT) | |
| 1.5.3.02. | Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate - BTO) | |
| 1.5.3.03. | Kerjasama Operasi (KSO) | |
| 1.5.4. | Aktiva Tidak Berwujud | |
| 1.5.4.01. | Aktiva Tidak Berwujud | |
| 1.5.5. | Aset Lain-lain | |
| 1.5.5.01. | Aset Rusak Berat | |
| 1.5.5.02. | Aset Tetap Renovasi | |
| 1.5.5.03. | Aset Lain-lain Lainnya | |
| **2.** | **KEWAJIBAN** | |
| 2.1. | Kewajiban Jangka Pendek | |
| 2.1.1. | Hutang Perhitungan Pihak Ketiga | |
| 2.1.1.01. | Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan | |

| KODE | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2.1.1.02. | Hutang PFK Lainnya | |
| 2.1.2. | Hutang Bunga | |
| 2.1.2.01. | Hutang Bunga kepada Bank | |
| 2.1.2.02. | Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank | |
| 2.1.3. | Hutang Pajak | |
| 2.1.3.01. | Hutang Pajak Pertambahan Nilai | |
| 2.1.3.02. | Hutang Pajak Penghasilan PPh 21 | |
| 2.1.3.03. | Hutang Pajak Penghasilan PPh 22 | |
| 2.1.3.04. | Hutang Pajak Penghasilan PPh 23 | |
| 2.1.3.05. | Hutang Pajak Lainnya | |
| 2.1.3.06. | Hutang Pajak Daerah | |
| 2.1.4. | Pendapatan Diterima Dimuka | |
| 2.1.4.01. | Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka | |
| 2.1.4.02. | Uang Muka Penjualan Aset Desa | |
| 2.1.4.03. | Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa | |
| 2.1.4.04. | Uang Muka Bagian Laba BUMDes | |
| 2.1.5. | Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang | |
| 2.1.5.01. | Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang | |
| 2.1.6. | Hutang Jangka Pendek Lainnya | |
| 2.1.6.01. | Hutang Belanja Pegawai | |
| 2.1.6.02. | Hutang Belanja Telepon | |
| 2.1.6.03. | Hutang Belanja Air Minum | |
| 2.1.6.04. | Hutang Belanja Listrik | |
| 2.1.6.05. | Hutang Pengadaan Bahan Habis Pakai | |
| 2.1.6.06. | Hutang Pengadaan Barang/Jasa | |
| **3.** | **EKUITAS** | |
| 3.1 | Ekuitas | |
| 3.1.1 | Ekuitas | |
| 3.1.1.01 | Ekuitas | |
| 3.1.2 | Ekuitas SAL | |
| 3.1.2.01 | Ekuitas SAL | |
| 4. | PENDAPATAN | |
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | |
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | |

| KODE | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.1.1.01. | Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa | |
| 4.1.1.02. | Hasil Pengelolaan Pasar Desa | |
| 4.1.1.03. | Hasil Pengelolaan Pasar Hewan | |
| 4.1.1.04. | Hasil Pelelangan Ikan Yang Dikelola Desa | |
| 4.1.1.05. | Hasil Usaha Desa Lainnya | |
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | |
| 4.1.2.01. | Pendapatan Sewa Tanah Kas Desa | |
| 4.1.2.02. | Pendapatan Sewa Gedung Milik Desa | |
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | |
| 4.1.3.01. | Hasil Swadaya | |
| 4.1.3.02. | Hasl Gotong Royong | |
| 4.1.3.03. | Hasil Partisipasi Lainnya | |
| 4.1.4. | Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | |
| 4.1.4.01. | Pungutan Desa | |
| 4.1.4.02. | Hasil Penjualan Aset Desa Selain Tanah Yang Tidak Dipisahkan | |
| 4.1.4.03. | Hasil Pelepasan Tanah Desa Tahun Berjalan | |
| 4.1.4.04. | Bunga Simpanan Uang di Bank | |
| 4.1.4.05. | Tutuntan Ganti Kerugian (TGR) | |
| 4.1.4.06. | Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan | |
| 4.1.4.07. | Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Belanja | |
| 4.1.4.08. | Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan | |
| 4.1.4.09. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah Lainnya | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | |
| 4.2.1. | Dana Desa | |
| 4.2.1.01. | Dana Desa | |
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | |
| 4.2.2.01. | Bagi Hasil Pajak | |
| 4.2.2.02. | Bagi Hasil Retribusi Daerah | |
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | |
| 4.2.3.01. | Alokasi Dana Desa | |
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | |
| 4.2.4.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | |
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | |

| KODE | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4.2.5.01. | Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten | |
| 4.3. | Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah | |
| 4.3.1. | Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga | |
| 4.3.1.01. | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat | |
| 4.3.1.02. | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi | |
| 4.3.1.03. | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota | |
| 4.3.1.04. | Pendapatan Hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta | |
| 4.3.1.05. | Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan | |
| 4.3.1.06. | Pendapatan Hibah dari Perusahaan di Desa | |
| 4.3.1.07. | Pendapatan Sumbangan dari Pihak Ketiga Lainnya | |
| 4.3.2. | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | |
| 4.3.2.01. | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | |
| 5. | BELANJA | |
| 5.1. | Belanja Desa | |
| 5.1.1 | Belanja Pegawai | |
| 5.1.1.01. | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 5.1.1.02. | Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 5.1.1.03. | Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 5.1.1.04. | Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 5.1.1.05. | Penghasilan Staf Pemerintah Desa | |
| 5.1.1.06. | Tunjangan Kedudukan BPD | |
| 5.1.1.07. | Tunjangan Kinerja BPD | |
| 5.1.1.08. | Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 5.1.1.09. | Honorarium Pengelola Aset dan Keuangan Desa | |
| 5.1.1.10. | Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa | |
| 5.1.1.11. | Tunjangan Penambah kebutuhan Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 5.1.1.12. | Tunjangan Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa | |
| 5.1.1.13. | Uang Makan Kepala Desa dan Perangkat Desa | |

| | | |
|---|---|---|
| 5.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | |
| 5.1.2.01. | Belanja Alat Tulis Kantor | |
| 5.1.2.02. | Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih | |
| 5.1.2.03. | Belanja Benda Pos dan Materai | |
| 5.1.2.04. | Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu | |
| 5.1.2.05. | Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas | |
| 5.1.2.06. | Belanja Bahan Bacaan | |
| 5.1.2.07. | Belanja Bahan Material / Bangunan | |
| 5.1.2.08. | Belanja Obat-obatan | |
| 5.1.2.09. | Belanja Dekorasi dan Dokumentasi | |
| 5.1.2.10. | Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan | |
| 5.1.2.11. | Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet | |
| 5.1.2.12. | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, dll) | |
| 5.1.2.13. | Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja | |
| 5.1.2.14. | Belanja Jasa Instruktur/Pelatih/Narasumber | |
| 5.1.2.15. | Belanja Jasa Kebersihan/Penjaga Kantor | |
| 5.1.2.16. | Belanja Jasa Pembantu Modin | |
| 5.1.2.17. | Belanja Jasa Penjaga Makam | |
| 5.1.2.18. | Belanja Jasa Petugas Posyandu | |
| 5.1.2.19. | Belanja Jasa Petugas Perpustakaan Desa | |
| 5.1.2.20. | Belanja Jasa Petugas Pengelola Sampah | |
| 5.1.2.21. | Belanja Jasa Petugas Lainnya | |
| 5.1.2.22. | Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan | |
| 5.1.2.23. | Belanja Sewa Peralatan | |
| 5.1.2.24. | Belanja Sewa Ruangan atau Gedung | |
| 5.1.2.25. | Belanja Makanan dan Minuman | |
| 5.1.2.26. | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya | |
| 5.1.2.27. | Belanja Perjalanan Dinas | |
| 5.1.2.28. | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor | |
| 5.1.2.29. | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor, Alat Kantor lainnya dan Rumah Tangga | |
| 5.1.2.30. | Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana | |
| 5.1.2.31. | Belanja Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat | |

| KODE | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.2.32. | Belanja Bantuan Insentif Guru PAUD/TPQ | |
| 5.1.2.33. | Belanja Pajak Aset Desa | |
| 5.1.2.34. | Belanja Jasa Pendampingan Hukum | |
| 5.1.2.35. | Belanja Asuransi Mobil Dinas | |
| 5.1.2.36 | Belanja Oprasional RTRW | |
| 5.1.3 | Belanja Modal | |
| 5.1.3.01. | Belanja Modal Pengadaan Tanah Bangunan Kantor | |
| 5.1.3.02. | Belanja Modal Pengadaan Tanah Rumah Dinas | |
| 5.1.3.03. | Belanja Modal Pengadaan Tanah Pertanian dan Perkebunan | |
| 5.1.3.04. | Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan | |
| 5.1.3.05. | Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan | |
| 5.1.3.06. | Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum | |
| 5.1.3.07. | Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Jalan | |
| 5.1.3.08. | Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya | |
| 5.1.3.09. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat | |
| 5.1.3.10. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan | |
| 5.1.3.11. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel | |
| 5.1.3.12. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur | |
| 5.1.3.13. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan | |
| 5.1.3.14. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor | |
| 5.1.3.15. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga | |
| 5.1.3.16. | Belanja Modal Pengadaan Komputer | |
| 5.1.3.17. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio | |
| 5.1.3.18. | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi | |
| 5.1.3.19. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | |

| KODE | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 5.1.3.20. | Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja | |
| 5.1.3.21. | Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan | |
| 5.1.3.22. | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang | |
| 5.1.3.23. | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah | |
| 5.1.3.24. | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen | |
| 5.1.3.25. | Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan | |
| 5.1.3.26. | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya | |
| 5.1.3.27. | Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa | |
| 5.1.3.28. | Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa | |
| 5.1.3.29. | Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air | |
| 5.1.3.30. | Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan | |
| 5.1.3.31. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon | |
| 5.1.3.32. | Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah | |
| 5.1.3.33. | Belanja Modal Pengadaan Buku dan Perpustakaan | |
| 5.1.3.34. | Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan | |
| 5.1.3.35. | Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak | |
| 5.1.3.36. | Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Tanaman | |
| 6. | PEMBIAYAAN | |
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | |
| 6.1.1. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | |
| 6.1.1.01. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya | |
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | |
| 6.1.2.01. | Pencairan Dana Cadangan | |
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | |
| 6.1.3.01. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | |

| KODE | URAIAN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | |
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | |
| 6.2.1.01. | Pembentukan Dana Cadangan | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | |
| 6.2.2.01. | Penyertaan Modal Desa | |
| 7. | NON ANGGARAN | |
| 7.1. | Perhitungan Fiskal Pihak Ketiga | |
| 7.1.1. | Perhitungan PFK - Potongan Pajak | |
| 7.1.1.01. | Potongan Pajak PPN Pusat | |
| 7.1.1.02. | Potongan Pajak PPh Pasal 21 | |
| 7.1.1.03. | Potongan Pajak PPh Pasal 22 | |
| 7.1.1.04. | Potongan Pajak PPh Pasal 23 | |
| 7.1.1.05. | Potongan Pajak PPh Lainnya | |
| 7.1.1.06. | Potongan Pajak Daerah | |
| 7.1.2. | Perhitungan PFK - Uang Muka dan Jaminan | |
| 7.1.2.01. | Uang Muka dan Jaminan | |

## 3. PARAMETER SUMBERDANA

| NO. | KODE | NAMA SUMBER DANA | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PAD | Pendapatan Asli Desa | |
| 2 | ADD | Alokasi Dana Desa | |
| 3 | DDS | Dana Desa (Dropping APBN) | |
| 4 | PBH | Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | |
| 5 | PBK | Penerimaan Bantuan Kab/Kota | |
| 6 | PBP | Penerimaan Bantuan Provinsi | |
| 7 | SWD | Swadaya Masyarakat | |
| 8 | DLL | Pendapatan Lain Lain | |
| 9 | SLP | SILPA Tahun Sebelumnya | |

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

**Lampiran I Penturan Desa**

Nomo : Laporan Pertanggungjawaban
Tentang : Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran

**FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI**
**PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DBSA**
**PBMBRINTAH DBSA .....**
**TAHUN ANGGARAN ....**

| Kode Rekening | | | | | URAIAN | ANGGARAN IRo.1 | REALISASI | LEBIH/ KURANG | % | KBTERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| | | 1 | | | **PENDAPATAN** | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | | **Pendapatan Aall Desa** | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | **Hamil Uaaha** | | | | | |
| | | | | | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa | | | | | |
| | | | | | Tanah Kas Desa | | | | | |
| | | | | | Tanah Desa | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | **HaailAaet** | | | | | |
| | | | | | Pasar Desa | | | | | |
| | | | | | Pasar Hewan | | | | | |
| | | | | | Tambatan Perahu | | | | | |
| | \ | | | | Bangunan Desa | | | | | |
| | | | | | Pelelangan Ikan | | | | | |
| | | | | | Lain-lain Kekavnnn Millk Desa | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | **Swadava. Partisivasl dan Gotong Rovong** | | | | | |
| | | | | | Tenaga | | | | | |
| | | | | | Barang | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | **Laln-lain Pendapatan Asll Desa vane sah** | | | | | |
| | | | | | hasil peniualan kekayaan desa vang tidak dipisahkan | | | | | |
| | | | | | insn giro, bunga deposito | | | | | |
| | | | | | penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain | | | | | |
| | | | | | pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekeriaan | | | | | |
| | | | | | pendapatan dari pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum | | | | | |
| | | | | | pendapatan dari angsuran/cicilan peniualan | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | | **Pendapatan Transfer** | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | **Dana Desa** | | | | | |
| | | | | | Dana Desa | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | **Alokasl Dana Desa** | | | | | |
| | | | | | Alokasi Dana Desa | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | **Bagian Hasil Pajak Daeaiah** | | | | | |
| | | | | | Bagian Hasil Paiak Daerah | | | | | |
| | 0 | 1 | 2 | 4 | **Baglan Hasil Retribusi Daerah** | | | | | |
| | | | | | Bagian Hasil Retribusi Daerah | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | **Bantuan Keuangan Provinsl** | | | | | |
| | | | | | Bantuan Keuangan Provinsi | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | **Bantuan Keuangan Kabupaten** | | | | | |
| | | | | | Bantuan Keuangan Kabupaten | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | | **Pendapatan Lain lain** | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | **Hibah** | | | | | |
| | | | | | Hibah dari pemerintah | | | | | |
| | | | | | Hibah dari pemerintah provinsi | | | | | |
| | | | | | Hibah dari pemerintah Kabupaten | | | | | |
| | | | | | Hibah dari badan/lembaga/organiaasi swasta | | | | | |
| | | | | | Hibah dari kelompok masvarakat/ perorangan | | | | | |
| | | | | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 vang tidak mengikat | | | | | |
| | | | | | Dst..... | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | **Laln-lain Pendapatan Desa yang sah** | | | | | |
| | | | | | Lain-lain Pendapatan Desa vang sah | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **JUMLAH PENDAPATAN** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **2** | | | **BBLANJA** | | | | | |
| **1** | | | | | ***BIDANO PEN7ELBNQQARAAANPEMERINTAHAN DBSA*** | | | | | |
| **1** | **1** | | | | **Penghaallan Tatap dan Tuniangan** | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | | **Belania Pegawak** | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Tuniangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Tuniangan BPD | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **1** | **3** | | | | ***Operational Perkantoran*** | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | **Bolanja Barang dan Jaaa** | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Belania Bahan Pakol Habis | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Jasa Kantor | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | Belanja Makannn dan Minuman | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | Belanja Pnknlnn Dinas dan Atribut | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | Belania Perialanan Dinas | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | Belania Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **1** | **31** | | | | ***Pengadaan dan Pemellharaan Sarana dan praaarana Kantor*** | | | | | |
| 1 | 31 | 2 | 2 | | **Belanja Barang** dan **Jaaa** | | | | | |
| 1 | 31 | 2 | 2 | 15 | Belania Pemellharaan | | | | | |
| 1 | 31 | 2 | 3 | | **Belanja Modal** | | | | | |
| **1** | 31 | 2 | 3 | 12 | Belania Modal Peralatan Kantor | | | | | |
| 1 | 31 | 2 | 3 | 14 | Belania Modal Komputer | | | | | |
| **T** | 31 | 2 | 3 | 15 | Belania Modal Mebeulair | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| i | 3 | | | | ***Operational BPD*** | | | | | |
| i | 3 | 2 | 2 | | **Belania Barang dan Jaaa** | | | | | |
| i | 3 | 2 | 2 | 1 | Bahan Pakai Habis | | | | | |
| i | 3 | 2 | 2 | 5 | Cetak dan Penggandaan | | | | | |
| **I** | 3 | 2 | 2 | 10 | **Makan dan Mlnum** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| i | 4 | | | | ***Operational RT/RW*** | | | | | |
| i | 4 | 2 | 2 | | **Belanja Barang dan Jaaa** | | | | | |
| i | 4 | 2 | 2 | 1 | Bahan Pakai Habis | | | | | |
| i | 4 | 2 | 2 | 5 | Cetak dan Penqqandaan | | | | | |
| i | 4 | 2 | 2 | 10 | Makan dan Mlnum | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | **BIDANQ PBLAKSANAAN PBMBANOUNAN DBSA** | | | | | |
| 2 | 14 | | | | ***Keatatan Perbaikan Saluran Iriqasi*** | | | | | |
| 2 | 14 | 2 | 3 | | **Belania Modal** | | | | | |
| 2 | 14 | 2 | 3 | 23 | Belania Modal Konstruksi Jaringan Air | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | 16 | | | | **Keglatan Pembangunan Jalan Pemukiman Desa** | | | | | |
| ***2.*** | 16 | 2 | 3 | | **Belanja Modal:** | | | | | |
| | 16 | 2 | 3 | 21 | Belania Modal Konstruksi Jalan Desa | | | | | |
| | | | | | •dst..... | | | | | |
| **~-** | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | | | | **Keglatan Pembangunan Gedung Posrandu** | | | | | |
| 2 | 20 | 2 | 3 | | **Belanja Modal:** | | | | | |
| 2 | 20 | 2 | 3 | 26 | Belania Modal Konstruksi/Pembelian Bangunan Desa | | | | | |
| | | | | | •dst..... | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | **BIDANO PBMBINAAN KBMASYARAKATAN** | | | | | |
| 3 | 2 | | | | **Keglatan Pamblnaan Ketentraman dan Ketertiban** | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | | **Belania Barang dan Jaaa:** | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bahan / Material | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | Makan dan Mlnum | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | Honorarium Nara Sumber /Tenaqa Ahli /Pelatih | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | **BIDANO PEMBBRDAYAAN MASYARAKAT** | | | | | |
| 4 | 3 | | | | **Keglatan Pelatthan Kepala Desa dan Perangkat** | | | | | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | | **Belanja Barang don Jasa:** | | | | | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | Bahan/Material | | | | | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | Makan dan Mlnum | | | | | |
| **4** | **3** | **2** | **2** | **20** | **Honorarium Nara Sumber /Tenaqa Ahfl /PelaUh** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **5** | | | | | **Bttfarw Totfc *Terduaa*** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **JUMLAH BBLAN JA** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ***SURPLUS / DBFtSIT*** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **0** | **0** | **3** | | | **PEMBIAYAAN** | | | | | |
| **0** | **0** | **3** | ***1*** | | **Penerimaan *Pemblauaan*** | | | | | |
| **0** | **0** | **3** | **1** | **1** | **SILPA Tahun Sebelumnva** | | | | | |
| **0** | **0** | **3** | **1** | **2** | **Pencairan Dana Cadangan** | | | | | |
| **0** | **0** | **3** | **1** | **3** | **Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dipisahkan** | | | | | |
| **0** | **0** | **3** | **1** | **3** | **Penerimaan Piniaman Desa** | | | | | |
| | | | | | **JUMLAH ( RP)** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **0** | **0** | ***3*** | **2** | | ***Penaeluaran Pemblauaan*** | | | | | |
| **0** | **0** | **3** | **2** | **1** | **Pembentukan Dana Cadangan** | | | | | |
| **0** | **0** | **3** | **2** | **2** | **Penvertaan Modal Desa** | | | | | |
| **0** | **0** | **3** | **2** | **3** | **Pembavaran Pokok Utang dan Bunga** | | | | | |
| | | | | | **JUMLAH IRPI** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Pembiaynnn Hoto** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**DISETUJU1 OLEH**
**KEPALADESA …….**

**TTD**

**(……..)**

**Lamplran II Poraturan Dosa**
**Nomor : .....**
**Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Oengan 31 Desember**

**LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA**
**SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....**

| URAIAN | PER 31 DESEMBER 20.... | PER 31 DESEMBER 20.... |
|---|---|---|
| **I. ASET DESA**<br>**A. ASETLANCAR *1.***<br>***Kas Desa***<br>a. Uang kas di Bendahara Desa<br>b. Rekening Kas Desa<br><br>**2. *Ptutang***<br>a. Piutang Sewa Tanah<br>b. Piutang Sewa Oedung<br>c. dst.....<br><br>**3. Pereediaan**<br>a. KertasSegel<br>b. Materai<br>c. Buku<br>Chek<br>C.ATK<br>e. dst | | |
| **JUMLAH ASET LANCAR** | | |
| **B. ASET TIDAK**<br>**LANCAR *1. Investasi Permanen***<br>- Penyertaan Modal Pemerintah Desa<br><br>**2. *Aset Tetap***<br>• Tanah<br>- Peralatan dan Mesin<br>- Oedung dan bangunan<br>- Jalan, Jaringan dan Instalasi<br>- dst.....<br><br>**3. Dana *Cadangan***<br>- Dana Cadangan<br><br>***4. Asettidak lancar Lainnya*** | | |
| **JUMLAH ASET TIDAK LANCAR** | | |
| **JUMLAH ASET *IA + B)*** | | |
| | | |
| **II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | |
| **-** Hutang Pajak | | |
| **JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | |
| **JUMLAH KEKAYAAN BERSIHII - II1** | | |
| | | |

**TANGGAL**

TTD

**(KEPALA DESA)**

Lampiran III Peraturan Desa
Nomor :.....
Tentang : Program Scktoral dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal
Desa
Kecamatan
Kabupaten

| N9, | Jenis Keeiatan | Lokasi Keeiatan | Rincian Keeiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Jumlah (RD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | Sub Total .Icnis Kci i a t a n ( 1 ) | | | | | | Rn. |
| | | | | | | | |
| | Sub Total Jenis Keeiatan (21 | | | | | | Rn. |
| | | | | | | | |
| | Sub Total Jenis Keeiatan (3) | | | | | | Rn. |
| | | | | | | | |
| | Sub Total (4) Total(1 s/d 4] | | | | | | Rp. RD. |

tanggal, .....
Kepala Desa

(…… )

## B. Format Rencana Anggaran Biaya ( RAB )

| RENCANA ANGGARAN BIAYA | Formulir |
|---|---|
| DESA KECAMATAN TAHUN ANGGARAN | |

BIdang
: Kegiatan
: Lolcasi Kegiatan Waktu Pelaksanaan

| Indlkator & Tolak Ukur Klnerja | | |
|---|---|---|
| **Indikator** | **Tolok Ukur Klnerja** | **Target Klnerja** |
| Capalan BIdang | | 100% |
| Masukan | | |
| Keluaran | | |
| Hasll | | 100% |

Rlndan Anggaran Blaya Belanja .....
Menurut BIdang dan Kegiatan Desa

| Kode Rekening | | | | | Uraian | Rindan Penghitungan | | | | Jumtah (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Vol | Satuan | | Harga Satuan | |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 = (3X5) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ------- | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ------- | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ------ | ------ | ------- | ---------- | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah | | | | | | | | |

| Dlsetujui /mengesahkan<br>Kepala Desa | Pelaksana Kegiatan (PelaksanaTeknls Pengelolaan Keuangan Desa) |
|---|---|

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan

| Koordinator PTPKD | | | |
|---|---|---|---|
| **No** | Nana Lengkap | Jabatan | Tanda tangan |
| | | Sekretaris Desa | |

**Cara pengisian:**

1. formulir RAB-DESA diisi sesuai dengan belanja desa dalam struktur APBDesa
2. bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasiflkasi kelompok belanja desa
3. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalamAPBDesa
4. lokasi Kegiatan diisi sesuai dengan tempat kegiatan
5. waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian kegiatan
6. capaian bidang diisi sesuai dengan bidang kegiatan
7. masukan diisi dengan dana / anggaran
8. keluaran diisi dengan hasil yang dicapal dalam kegiatan
9. hasil diisi dengan manfaat yang diharapkan dari kegiatan
10. kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
11. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan
12. kolom 3 diisi dengan volume dalam kegiatan
13. kolom 4 diisi dengan satuan dapat berupa orang/barang
14. kolom 5 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
15. kolom 6 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 5.

**C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN**

# BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

DESA .... KECAMATAN ....

TAHUN ANGGARAN ..

**1. Bidang**

**2. Kcgiatan**

| No. | Tangg.il | Uraian | Pcncrimaan (Rp.) | | Nomor Bukli | Pengeluaran(Rp.) | | | Jumlah Pcngcmbalian kc* Bcndahara | **Saldo** Kas (Kp.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dari Bcndahara | Swadava Masvarakal | | Belanja Pegawai | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal | | |
| **1** | ***2*** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Pindahan Jumlah dari halamaii srlx'luinnva | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Jumlah | | | | | | | | |
| | | Total Pcncrimaan | | - | | Total Pcngcluaran | | | | |
| | | | | | | Total Pcngeluaran * Soldo Kas | | | | |

Dcsa ……

Sidoarjo. ……..

**Pclaksana Kcgiatan**

**…….**

***Petunjuk pengisian :***

*hBidang diisi bcrdasarkan klasifikasi kelompok.*

*2. Kegiatan diisi sesuai dcngan yang ditctapkan dalam APBDesa.*

*3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut*

*4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.*

*5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi*

*0. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang ditcrima bendahara.*

*7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang ditcrima dari masyarakat.*

*8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukh transaksi.*

*9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengctuaran bcianja pcgaivai*

*10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengctuaran belanja barang dan jasa.*

*11. Kolom 9 diisi dengan jenis pengchiaran belanja modal.*

*12. Kolom 10 diisi dengan jumlah rupiah yang dikcmbalikan kcpada bcndahara.*

*13. Kolom 11 diisi dengan jumlah satdo kas dalam rupiah.*

**D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)**

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )**

**DESA..... KECAMATAN .....**

**TAHUN ANQOARAN.....**

**1. Bidang**

**2. Kegiatan**

**3. Waktu Pelaksanaaa**

**Rincian Pendanaan:**

| ] Kode Rekeni ) | URA1AN | PAQU ANQOARAN | PENCAIRAN 8.D. YG LALU | PERMINTAAN SEKARANG | JUMLAH 8AMPAI SAAT INI | SI8A DANA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IRp.J | (Rp.l | IRp.1 | (Rp.l | (Rp.l |
| 1 | 2 | 3 | 4 | S | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | |

**Telah dilakukan verivikasi**

**Sekretaris Desa** **Pelaksanaan Kegiatan**

**…….** **……..**

***Setujui untuk dibayarkan*** ***Telah dibayar Lunas***

***Kepala Desa*** ***Bendahara Desa***

**……** **……...**

***Petunjuk pengisian****:*

1. *Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa*
2. *Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai denganurutankegiatan dalamAPBDesa.*
3. *Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai urutan belanja dalam APBDesa*
4. *Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan*
5. *Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.*
6. *Kolom 4 diisi dengan rincianjumlah anggaran gang telah dibayar sebelumnya*
7. *Kolom 5 diisi dengan rincian gang dimintakan untuk dibayar*
8. *Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini*
9. *Kolom 7 disi dengan sisa anggaran*

**Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja**

**PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA**
**DESA ..... KECAMATAN.....**
**TAHUN ANGGARAN.....**

1. **Bldang**
2. **Kegiatan** :

| **NO.** | PENERIMA | URA1AN | JUMLAH |
|---|---|---|---|
| | | | IRD.1 |
| **1** | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **JUMLAH (Rp.)** | | | - |

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenamya.

Sidoarjo, tanggal.....
**Pelaksana Kegiatan**

***Petunjuk pengisian****:*

*1. Bidang dasi dengan kode rekening berdasarkan klasipkasi kehmpok belanja desa.*
*2. Kegiatan ctusi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalamAPBDesa*
*3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut*
*4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran gang ada di bukti belanja*
*5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja*
*6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja*

**Lampiran Peraturan Desa**
**Notnor : ……...**
**Tahun : ……**
**Tentang : …….**
**Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Des**

**FORMAT**

**ANGOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**
**PEMERINTAH DESA .....**
**TAHUN ANGGARAN....**

| Kode Rekening | | | | | URAIAN | ANGGARAN (RO.I | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 |
| | | 1 | | | **PENDAPATAN** | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | | **Pendapatan Asli Desa** | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | **HasilUsaha** | | |
| | | | | | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa | | |
| | | | | | Tanah Kas Desa | | |
| | | | | | Tanah Desa | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | HasUAset | | |
| | | | | | Pasar Desa | | |
| | | | | | Pasar Hewan | | |
| | | | | | Tambatan Perahu | | |
| | | | | | Bangunan Desa | | |
| | | | | | Pelelangan Ikan | | |
| | | | | | Lain-lain Kekayaan Milik Desa | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | **Swadaya, Partlsiposi dan Gotong Royong** | | |
| | | | | | Tenaga | | |
| | | | | | Barang | | |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | **Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah** | | |
| | | | | | hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan | | |
| | | | | | jasa giro, bunga deposito | | |
| | | | | | penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk tain | | |
| | | | | | pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan | | |
| | | | | | pendapatan dari pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum | | |
| | | | | | pendapatan dari anRSUran/dcilan penjualan | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | | **Pendapatan Transfer** | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | **Dana Desa** | | |
| | | | | | Dana Desa | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | **Alokasi Dana Desa** | | |
| | | | | | Alokasi Dana Desa | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | **Baeian Hasil PaJak Daearab** | | |
| | | | | | Bagian Hasil Pajak Daerah | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | **Bagian Hasil Retribusi Daerah** | | |
| | | | | | Bagian Hasil Retribusi Daerah | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | **Bantuan Keuangan Provinsi** | | |
| | | | | | Bantuan Keuangan Provinsi | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | **Bantuan KeuanKan Kabupaten** | | |
| | | | | | Bantuan Keuangan Kabupaten | | |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | | **Pendapatan Lain lain** | | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | **Hibah** | | |
| | | | | | Hibah dari pemerintah | | |
| | | | | | Hibah dari pemerintah provinsi | | |
| | | | | | Hibah dari pemerintah Kabupaten | | |
| | | | | | Hibah dari badan/lembaRa/organisasi swasta | | |
| | | | | | Hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | **Lain-lain Pendapatan Desa yang sah** | | |
| | | | | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **JUMLAH PENDAPATAN** | | |
| | | | | | | | |
| | | 2 | | | **BELANJA** | | |
| 1 | | | | | ***BIDANG PBNYBLENGGARAAAN PEMERINTAHAN DBSA*** | | |
| 1 | 1 | | | | **Penghasilan Tetap dan Tunjangan** | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | | **Belanja Pegawai:** | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Tunjangan BPD | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | ***Operasional Perkantoran*** | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | **Belanja Barang dan Jasa** | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Belanja Bahan Pakai Habis | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Jasa Kantor | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | Belanja Makanan dan Minuman | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | Belanja Perjalanan Dinas | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | Belanja Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 31 | | | | ***Pengadaan dan Pemettharaan Sarana dan prasarana Kantor*** | | |
| 1 | 31 | 2 | 2 | | **Belanja Barang dan Jasa** | | |
| 1 | 31 | 2 | 2 | 15 | Belanja Pemeliharaan | | |
| 1 | 31 | 2 | 3 | | **Belanja Modal** | | |
| 1 | 31 | 2 | 3 | 12 | Belanja Modal Peralatan Kantor | | |
| 1 | 31 | 2 | 3 | 14 | Belanja Modal Komputer | | |
| 1 | 31 | 2 | 3 | 15 | Belanja Modal Mebeulair | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | | ***Operasional BPD*** | | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | | **Belanja Barang dan Jasa** | | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Bahan Pakai Habis | | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | **Cetak dan Penggandaan** | | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | **Makan dan Minum** | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 4 | | | | **Operasional *RT/RW*** | | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | | **Belanja Barang dan Jasa** | | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | Bahan Pakai Habis | | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | Cetak dan Penggandaan | | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | Makan dan Minum | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | | | | | **BIDANQ PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DBSA** | | |
| 2 | 14 | | | | ***Keglatan Perbaikan Saluran Irigasi*** | | |
| 2 | 14 | 2 | 3 | | **Belanja Modal** | | |
| 2 | 14 | 2 | 3 | 23 | Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air | | |
| | | | | | •dst..... | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 16 | | | | **Keglatan Pembangunan Jalan Pemuklman Desa** | | |
| 2 | 16 | 2 | 3 | | **Belanja Modal:** | | |
| 2 | 16 | 2 | 3 | 21 | Belanja Modal Kontruksi Jalan Desa | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2 | 20 | | | | **Keglatan Pembangunan Gedung Posyandu** | | |
| 2 | 20 | 2 | 3 | | **Belanja Modal:** | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **20** | **2** | 3 | 26 | Belanja Modal Konstruksi/Petnbelian Bangunan Desa | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **3** | | | | | **BIDANG PEMB1NAAN KEMASYARAKATAN** | | |
| **3** | **2** | | | | **Kegiatan Pemblnaan Ketentraman dan Ketertiban** | | |
| **3** | **2** | **2** | 2 | | **Belanja Barang dan Jasa:** | | |
| **3** | **2** | **2** | 2 | 2 | Bahan/Materlal | | |
| **3** | **2** | **2** | 2 | 10 | Makan dan Minum | | |
| **3** | **2** | **2** | 2 | 20 | Honorarium Nara Sumber /Tenaga Ahli /Pelatih | | |
| | | | | | -dst ..... | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **4** | | | | | **BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT** | | |
| **4** | **3** | | | | **Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat** | | |
| **4** | **3** | **2** | 2 | | **Belanja Barang dan Jasa:** | | |
| **4** | **3** | **2** | 2 | 2 | Bahan/Material | | |
| **4** | **3** | **2** | 2 | 10 | Makan dan Minum | | |
| **4** | **3** | **2** | 2 | 20 | Honorarium Nara Sumber /Tenaga Ahli /Pelatih | | |
| | | | | | •dst ..... | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **5** | | | | | ***Bidtmg Tak Terduga*** | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **JUMLAH BELANJA** | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | ***SURPLUS / DEFISIT*** | | |
| | | | | | | | |
| **0** | **0** | **3** | | | **PEMB1AYAAN** | | |
| **0** | **0** | *3* | J | | ***Penerimaan Pembiauaan*** | | |
| **0** | **0** | 3 | 1 | 1 | SILPA Tahun Sebelumnya | | |
| **0** | **0** | 3 | 1 | 2 | Pencairan Dana Cadangan | | |
| **0** | **0** | 3 | 1 | 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dipisahkan | | |
| **0** | **0** | 3 | 1 | 3 | Penerimaan Pinjaman Desa | | |
| | | | | | **JUMLAH (RP)** | | |
| | | | | | | | |
| **0** | **0** | *3* | 2 | | ***Penaetuaran Pembiauaan*** | | |
| **0** | **0** | 3 | 2 | 1 | Pembentukan Dana Cadangan | | |
| **0** | **0** | 3 | 2 | 2 | Penyertaan Modal Desa | | |
| **0** | **0** | 3 | 2 | 3 | Pembayaran Pokok Utang dan Bunga | | |
| | | | | | **JUMLAH (RPI** | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | **Pemblayaan Neto** | | |
| | | | | | | | |

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA ……

TTD

( ……..)

## G. Format Laporan Realisasl Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

**FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN**
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**
**8EHE8TER PERTAMA / AKHIR TAHUN**
**PEHBRINTAH DESA .....**
**TAHUN ANGGARAN ....**

| Kode Rokanlng | | | | | URAIAN | ANGGARAN IRp.l | REALISASI | LEBIH/ KORANQ | % | KETERANQAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | 2 | 3 | | 4 | S | 6 |
| | | 1 | | | **PENDAPATAN** | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | | **Pendapatan Aall Desa** | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | **Hasil Usaha** | | | | | |
| | | | | | Hasil PenEelolaan Kekavann Desa | | | | | |
| | | | | | Tanah Kas Desa | | | | | |
| | | | | | TanahDesa | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | **HaaUAMt** | | | | | |
| | | | | | Pasar Desa | | | | | |
| | | | | | Pasar Hewan | | | | | |
| | | | | | Tambatan Perahu | | | | | |
| | | | | | Bangunan Desa | | | | | |
| | | | | | Pelelansan Iknn | | | | | |
| | | | | | Uiin-lain Kekavaan Millk Desa | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | **Swadava. Partlslpasl dan Ootonc Royone** | | | | | |
| | | | | | Tenaga | | | | | |
| | | | | | BaranR | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | J | 4 | **Lain-laln Pendapatan Asll Data yang san** | | | | | |
| | | | | | hasil peniualan kekavaan desa vang Udak dipisahkan | | | | | |
| | | | | | insa eiro. bunga deposito | | | | | |
| | | | | | penerimaan komisi, potonean ataupun bentuk lain | | | | | |
| | | | | | pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekeriaan | | | | | |
| | | | | | pendapatan dari pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum | | | | | |
| | | | | | pendapatan dari annsuran/cicilan peniualan | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | | **Pendapatan Transfer** | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Dana **Desa** | | | | | |
| | | | | | Dana Desa | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | **Alokasi Dana Desa** | | | | | |
| | | | | | Alokasi Dana Desa | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | **Baeian Haall Palak Daearah** | | | | | |
| | | | | | Bagian Hasil Pajak **Daerah** | | | | | |
| ^ | 0 | 1 | 2 | 4 | **Baeian Hasil Retribusl Daerah** | | | | | |
| | | | | | Banian Hasil Retribusi Daerah | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | **Bantuan Keuangan Provlnsl** | | | | | |
| | | | | | Bantuan Keuangan Provinsi | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | **Bantuan Keuanean Kabupaten** | | | | | |
| | | | | | Bantuan KeuanRan Kabupaten | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 9 | 1 | 3 | | **Pendapatan Lain lain** | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | **Hibah** | | | | | |
| | | | | | Hibah dari pemerintah | | | | | |
| | | | | | Hibah dari pemerintah provinsi | | | | | |
| | | | | | Hibah dari pemerintah Kabupaten | | | | | |
| | | | | | Hibah dari badan/Lembajsa/onianisasi swasta | | | | | |
| | | | | | Hibah dari kelomnok masvarakat/ peroranKan | | | | | |
| | | | | | Hibah dan SumbanRan dari pihak ke-3 vans tidak merwikat | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | **Lain-laln Pendapatan Desa vann sah** | | | | | |
| | | | | | Lain-lain Pendapatan Desa vang sah | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **JUMLAH PENDAPATAN** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2 | | | **BELANJA** | | | | | |
| **1** | | | | | ***BIDANO PENYBLENQQARAAANPEMBRINTAHAN DESA*** | | | | | |
| **1** | **1** | | | | **Fenghasllan Tetap dan Tunjangan** | | | | | |
| **1** | 1 | 2 | 1 | | **Belania Pegawal:** | | | | | |
| **1** | 1 | 2 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepnln Desa dan Perangkat | | | | | |
| **1** | 1 | 2 | 1 | 2 | Tunjangan Jabatan Kepaia Desa dan Perangknt | | | | | |
| **1** | 1 | 2 | 1 | 3 | Tuniangon BPD | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **1** | 2 | | | | ***Operational Perkantoran*** | | | | | |
| **1** | 2 | 2 | 2 | | **Belanja Batang dan Jasa** | | | | | |
| t | 2 | 2 | 2 | 1 | Belania Bahan Pakai Habis | | | | | |
| **1** | 2 | 2 | 2 | 3 | Belanja Jasa Kantor | | | | | |
| **1** | 2 | 2 | 2 | 10 | Belanja Makanan dan Mlnuman | | | | | |
| **1** | 2 | 2 | 2 | 11 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut | | | | | |
| **1** | 2 | 2 | 2 | 13 | Belania Perialanan Dinas | | | | | |
| **I** | 2 | 2 | 2 | 20 | Belania Jasa Nara Sumber / Tenaga Ahli | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **1** | **31** | | | | ***Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kantor*** | | | | | |
| **1** | 31 | 2 | 2 | | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | |
| **1** | 31 | 2 | 2 | 15 | Belania Pemeliharaan | | | | | |
| **1** | 31 | 2 | 3 | | **Belanja Modal** | | | | | |
| **J,** | 31 | 2 | 3 | 12 | Belania Modal Peralatan Kantor | | | | | |
| | 31 | 2 | 3 | 14 | Belania Modal Komputer | | | | | |
| ' | 31 | 2 | 3 | IS | Belania Modal Mebeulair | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| I | 3 | | | | ***Operaatonal BPD*** | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | | **Belania Barang dan Jasa** | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | Bahan Pakai Habis | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | S | Cetak dan Penqqandaan | | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 10 | Makan dan Mlnum | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 4 | | | | ***Operational RT/RW*** | | | | | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | | **Belanja Barang dan Jasa** | | | | | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | Bahan Pakai Habis | | | | | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | Cetak dan Penqqandaan | | | | | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | Makan dan Mlnum | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | **BIDANO PELAXSANAAN PEMBANGUNAN DESA** | | | | | |
| 2 | 14 | | | | ***Keqlatan Perbaikan Saluran Irlqasl*** | | | | | |
| 2 | 14 | 2 | 3 | | **Belanja Modal** | | | | | |
| 2 | 14 | 2 | 3 | 23 | Belania Modal Kontruksi Jaringan Air | | | | | |
| | | | | | •dst..... | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **)** | 16 | | | | **Keglatan Pembangunan Jalan Pemuklman Desa** | | | | | |
| **:** | 16 | 2 | 3 | | **Belanja Modali** | | | | | |
| 2 | 16 | 2 | 3 | 21 | Belania Modal Konstrukai Jalan Desa | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2 | 20 | | | | **Keglatan Pembangunan Qedung Posyandu** | | | | | |
| 2 | 20 | 2 | 3 | | **Belania Modal;** | | | | | |
| 2 | 20 | 2 | 3 | 26 | Belanja Modal Konstruksi / Pembelian Bangunan Desa | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | **BIDANO PEMBINAAN KBMA8YARAKATAN** | | | | | |
| 3 | 2 | | | | **Keglatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertlban** | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | | **Belania Barang dan Jasa:** | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bahan / Material | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **2** | **2** | **2** | **10** | **Makan dan Mlnum** | | | | | |
| **3** | **2** | **2** | **2** | **20** | **Honorarium Nara Sumber / Tenaqa Ahll / PelaUh** | | | | | |
| | | | | | **-dst.....** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **4** | | | | | **BIDANG PEMBBRDAYAAN MASYARAKAT** | | | | | |
| **4** | **3** | | | | **Koglatan Pelatlhan Kopala Doaa dan Porangkat** | | | | | |
| **4** | **3** | **2** | **2** | | **Bolanja Barang don Joaas** | | | | | |
| **4** | **3** | **2** | **2** | **2** | **Bahan / Material** | | | | | |
| **4** | **3** | **2** | **2** | **10** | **Makan dan Mlnum** | | | | | |
| **4** | **3** | **2** | **2** | **20** | **Honorarium Nara Sumber / Tenaqa Ahli / Petatih** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **5** | | | | | ***Bldana Tak Torduaa*** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **JUMLAH BELANJA** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | ***SURPLUS / DBF1S1T*** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **0** | **0** | **3** | | | **FEMBIAYAAN** | | | | | |
| **0** | **0** | **3** | **1** | | ***Penerimaan Pembtauaan*** | | | | | |
| **0** | **0** | **3** | **1** | **1** | **SILPA Tahun Sebelumnya** | | | | | |
| **0** | **0** | **3** | **1** | **2** | **Pencairan Dana Cadangan** | | | | | |
| **1** | **0** | **3** | **1** | **3** | **HasH Penjualan Kekavaan Desa Yang dipisahkan** | | | | | |
| | **)o** | **3** | **1** | **3** | **Penerimaan Piniaman Desa** | | | | | |
| **-** | | | | | **JUMLAH (RP)** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **0** | **0** | ***3*** | **2** | | ***Pcnaeluaran Pemblauaan*** | | | | | |
| **0** | **0** | **3** | **2** | **1** | **Pembentukan Dana Cadangan** | | | | | |
| **0** | **0** | **3** | **2** | **2** | **Penvertaan Modal Desa** | | | | | |
| **0** | **0** | **3** | **2** | **3** | **Pembayaran Pokok Utang dan Bunga** | | | | | |
| | | | | | **JUMLAH IRPI** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Pomblavaan Neto** | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA ……

TTD

( ……..)

## F. FORMAT PENATAUSAHAAN

### 1. BUKU KAS UMUM

# BUKUKASUMUM

**DESA _____ KECAMATAH . . . .**

**TAHUH ANGGARAN . . . .**

| No. | Tnwggnl | KODE REKENING | | | | | URAIAN | PENERIHAAN | PENGELUARAN | HO BDKTI | JDMLAH PENGELUARAN KOMUIATIF | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IRo.l | (RD.I | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | Soldo Bnlan Laltt | | | | | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | JUM | LAH_ | | | | | . | - | | | |

**Sidoarjo, Tanggal,**

**MENGETAHUI**
KEPALA DESA

**BENDAHARA** DESA,

***Petunjuk pengisian :***

*1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengebiaran kas*
*2. Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengebiaran kas*
*3. Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengebiaran kas*
*4. Kolom 4 diisi' dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengebiaran kas*
*5. Kolom 5 diisi dengan jumiah rupiah penerimaan kas*
*6. Kolom 6 diisi dengan jumiah rupiah pengebiaran kas*
*7. Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi*
*8. Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengebiaran kas*
*9. Kolom 9 diisi dengan soldo kas.*

Catataa ;

Sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf

**F. FORMAT PENATAUSAHAAN 2. BUKU KAS TUNAI**

**BUKU KAS TUNAI**

**DESA ..... KECAMATAN**
**TAHUN ANGOARAN .**

| No. | TANGGAL | URAIAN | Penerimaan | Pengsloaran | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (Ro.» | <Rp.l | IRo.» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | s | 6 |
| | | Saldo Bulan Lalu | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| JUMLAH | | | | | |
| 1 | 1 | | | | |

Sidoarjo, tanggal ……

**MENGETAHUI**
**KEPALA DESA,**

**BENDAHARA DESA**

…….. ……

***Petunjuk pengisian****:*

*J. Kolom 1 diisi dengan nomor unit penenma kas tunai atau pengehiaran kas tunai*
*2. Kolom 1 dasi dengan tanggal penerimaan kas tunai atau pengehiaran kas tunai*
*3. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas tunai atau pengehiaran kas tunai*
*4. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas tunai*
*5. Kolom* 5 dasi *dengan jumlah rupiah pengehiaran kas tunai*

*Kolom 6 dasi dengan soldo kas*

F. FORMAT PENATAUSAHAAN

4. BUKU BANK DESA

BUKU BANK DESA

DESA .....KECAMATAN ....

TAHUN ANGGARAN ..

| No. | TANGGAL TRANSAKSI | URAIAN TRANSAKSI | I5UKTI TRANSA KSl | PEMASUKAN | | PENGELUARAN | | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *SETORAN* | *BUNG A RANK* | *PENARIKAN* | *PAJAK* | *ADMINISTRASI* | |
| | | | | *(Rp.)* | *(Rp.)* | *(Rp.)* | *(Rp.)* | *(Rp.)* | |
| *1* | 2 | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| 1 | | Saldo hulan lalu | | | | | - | - | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTALTRANSAKSI BULAN INI | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | | | | | | | | | |

**MENGETAHUI**
KEPALA DESA

Sidoarjo, Tanggal .....

**BENDAHARA DESA,**

***Petunjuk pengisian*** *:*

*Kolom Idiisi dcngan nomor unit pemasukan dan pengehtarandengan Bank.*
*Kolom 2 diisi dcngan tanggal transaksi Bank.*
*Kolom 3 diisi dcngan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.*
*Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi*
*Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.*
*Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..*
*Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.*
*Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.*
*Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.*
*Kolom 10 diisi dengan saldo Bank*

**F. FORMAT PENATAUSAHAAN**

**5. BUKU PEMBANTU PAJAK**

**BUKU PEMBANTU PAJAK**
**DESA ..... KECAMATAN .....**
**TAHUN ANGOARAN .....**

| No. | TANGGAL | URAIAN | PEMOTONGAN | PENYETORAN | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | IRD.1 | IRp.1 | IRo.l |
| 1 | 2 | 3 | * | 4 | 5 |
| | | Saldo Bulan Lalu | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| JUMLAH | | | | | |
| 1 | | 1 | | | |

Sidoarjo,.....

**MENGETAHUI**
**KEPALA DESA,**
**DESA**

**BENOAHARA**

***Petunjuk. pengisian:***
*Kolom IdUsi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran*
*Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran*
*Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas*
*Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.*
*Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.*
*Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara*

**F FORMAT PENATAUSAHAN**

6. BUKU PEMBANTU PANJAR

# BUKU PEMBANTU PANJAR

**DESA . . . . . KECAMATAN . . . . . .**

**TAHUN ANGOARAN . .**

| Tanggal | Uraian | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sidoarjo, Tanggal,…….

Mengetahui
KEPALA DESA

BENDAAHARA DESA

**.....**

**……..**

***Petunjuk pengisian****:*

*Kolom 1 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran panjar*
*Kolom 2 diisi dengan uraian penerimaan kembali panjar atau pengeluaran panjar*
*Kolom 3 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kembali panjar*
*Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran Panjar*
*Kolom 5 diisi dengan saldo panjar*

## F. FORMAT PENATAUSAHAAN

7. BUKU PEMBANTU PEROBYEK PENERIMAAN

BUKU PEMBANTU PEROBYEK PENERIMAAN
DESA..... KECAMATAN .....
TAHUN ANGGARAN....

Kode Rekening _____
Nama Rekenina

| No. URUT | NOMOR BKU PENERIMAAN | TANGGAL SETOR | NOMOR STS & BUKTI PENERIMAAN LAINNYA | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | Rd. |
| | | | | Rd. |
| | | | | Rd. |

*<u>Cara Penaisian:</u>*
*Kolom 1 diisi dengan nomor unit*
*Kolom 2 diisi dengan Nomor BKU penerimaan*
*Kolom* 3 *diisi dengan Tanggal Penyetoran STS/Bukti Penerimaan lainnya*
*Kolom* 4 *diisi dengan Nomor STS/Bukti penerimaan lainnya.*
*Kolom* 5 *diisi denganjumlah rupiah setoran STS/Bukti penerimaan lainnya.*

**FORMAT PENATAUSAHAAN 8. REGISTER** SPP

# REGISTER SPP

**DESA . . . . KECAMATAN. .**

**TAHUN ANGGARAN. . . .**

| No. | Tanggal | No. | Uraian | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Sidoarjo .....

MENGETAHUI
KEPALA DESA.

BENDAHARA DESA,

*<u>Cara Penaisian:</u>*
*Kolom 1 diisi dengan nomorurut*
*Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan SPP*
*Kolom* 3 *diisi dengan Nomor SPP*
*Kolom* 4 *diisi dengan uraian permintaan SPP*
*Kolom* 5 *diisi denganjumlah rupiah permintaan SPP*
*Kolom* 5 *diisi dengan keterangan*